

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Alasan Pemilihan Judul**

Fenomena hubungan internasional tidak lagi terjadi pada ruang lingkup kerjasama antara hubungan bilateral dan multilateral. Ketika berbicara lebih dalam terkait hubungan internasional, maka aktor yang terlibat tidak hanya aktor-aktor pemerintahan suatu negara, namun juga melibatkan aktor-aktor non-pemerintah di dalamnya. Banyaknya aktor yang terlibat di dalam hubungan internasional, maka isu yang muncul pun lebih beranekaragam, seperti meliputi ekonomi, sosial, dan budaya. Kategori isu-isu-isu terkait *low politics* dan *high politics* pun mengalami pergeseran.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul **“Peran WWF-Indonesia dalam Pengembangan Ekowisata Lintas Batas (*Transboundary Ecotourism*) Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat”** dengan alasan, diantaranya:

Pertama, penulis merasa bahwa isu lingkungan merupakan isu yang sangat menarik untuk diangkat dan dibahas lebih dalam, karena isu lingkungan merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan dalam hubungan internasional.

Kedua, berdasarkan alasan pertama, maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran dari keterlibatan *Civil Society Organization* (CSO) dalam pengembangan suatu negara, yakni WWF (*World Wildlife Fund for Nature*) Indonesia di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.

Ketiga, penulis ingin mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dalam salah satu programnya, yakni *Transboundary Ecotourism*

(Ekowisata Lintas Batas) antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

## **Latar Belakang**

Fenomena hubungan internasional tidak lagi terjadi pada ruang lingkup hubungan kerjasama bilateral atau multilateral. Ketika berbicara tentang hubungan internasional, maka saat ini isu-isu yang terjadi tidak melulu didominasi oleh pemerintahan di suatu negara, namun isu-isu hubungan internasional saat ini cenderung melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah di dalamnya. Kerjasama yang dijalin juga tidak hanya antar satu negara dengan negara lain, tetapi juga suatu negara dengan organisasi internasional lain yang dirasa mampu untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut.

Isu-isu hubungan internasional yang termasuk ke dalam kategori *high politics*, seperti perang, keamanan dan lain sebagainya yang pada awalnya hanya melibatkan peran negara semata, namun pada saat ini hal tersebut telah bergeser dengan adanya keterlibatan organisasi-organisasi non-pemerintah di dalamnya. Saat ini banyak organisasi non-pemerintah yang turut bekerjasama dengan pemerintah suatu negara untuk sebuah program atau *project* tertentu.

Keterlibatan *Civil Society Organization* (CSO)<sup>1</sup> dalam pemerintahan suatu negara sudah sedemikian terbuka. CSO sendiri merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang secara sukarela mengatur dirinya sendiri dan mewakili berbagai kepentingan dan hubungan antara masyarakat sipil dengan pemerintahan,

---

<sup>1</sup> Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO) saat ini mulai digantikan dengan konsep *Civil Society Organization* (CSO), seperti halnya WWF-Indonesia. Berdasarkan korespondensi dengan penulis, maka para aktivis WWF-Indonesia lebih memilih menggunakan konsep CSO dibandingkan dengan NGO. Saat ini terminologi yang sedang dipopulerkan adalah penggunaan kata CSO untuk peralihan dari NGO ke CSO.

baik wilayah domestik maupun internasional. CSO ini merupakan sebuah organisasi berbasis masyarakat dan merupakan organisasi yang juga berbasis *indigenous people*, serta organisasi yang bersifat non-pemerintah<sup>2</sup>. Keterlibatan tersebut dilakukan dalam berbagai isu dan bidang, baik *low politics* atau *high politics*, seperti salah satunya isu dalam bidang lingkungan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia (*World Wildlife Fund for Nature-Indonesia*) sebagai salah satu CSO di Indonesia.

WWF-Indonesia (*World Wildlife Fund for Nature*) merupakan salah satu CSO yang bekerja pada lingkup konservasi alam dan pengembangan berkelanjutan. WWF-Indonesia merupakan sebuah CSO yang sudah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait isu lingkungan, baik organisasi ataupun negara untuk menjalankan program—program konservasinya. WWF-Indonesia bahkan sudah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, negara-negara di dunia, serta organisasi lain yang masih terkait dengan prinsip konservasi WWF-Indonesia, baik internasional ataupun nasional. Melalui hal tersebut, dapat dilihat bagaimana WWF-Indonesia sebagai CSO juga berperan dalam isu-isu hubungan internasional. Hal tersebut juga menjadi bukti, bahwa saat ini isu tentang lingkungan telah menjadi isu internasional atau *high politics* dan keterlibatan CSO di dalam pemerintahan suatu negara memang cenderung besar.

Sejauh ini, WWF-Indonesia telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Terdapat beberapa *project* konservasi yang sudah dan sedang dijalankan oleh WWF-Indonesia, seperti konservasi orangutan, penyu, hiu, dan program untuk *climate change*, yakni *Earth Hour* yang telah populer menjadi salah satu program WWF-Indonesia dan dijalankan setiap tahun.

---

<sup>2</sup> <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7231>

Perubahan iklim yang begitu cepat membuat pemerintah di berbagai negara harus berpikir dan bertindak cepat untuk membuat program penyelamatan atau konservasi lingkungan. Oleh sebab itu, Pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah, seperti salah satunya adalah WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat.

WWF-Indonesia, khususnya Program Kalimantan Barat membuat beberapa program konservasi lingkungan di Kalimantan Barat. Implementasi kerjasama yang dijalin tidak hanya melibatkan WWF-Indonesia, namun juga WWF-Jerman, WWF-Belanda, WWF-Amerika Serikat, WWF-Finlandia, dan WWF-Singapura. Pada kerjasama tersebut, dirancang sebuah program dengan sangat baik, seperti pemilihan lokasi yang strategis untuk menjalankan program konservasi lingkungan dan pengembangan berkelanjutan.

Kawasan utama yang dijadikan lokasi pelaksanaan program WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat terletak di kawasan “Jantung Borneo” (*Heart of Borneo*). *Heart of Borneo* (HoB) adalah inisiatif tiga negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan ini merupakan kawasan yang lebih dari setengahnya merupakan kawasan lindung dan merupakan jantung Kalimantan.<sup>3</sup>

Kawasan HoB dipilih sebagai lokasi utama untuk program konservasi dan pengembangan berkelanjutan, karena kawasan HoB dianggap sebagai kawasan yang sangat berpotensi dan setengah dari kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung. Kawasan ini memiliki berbagai potensi yang jika dikembangkan dengan

---

<sup>3</sup> WWF-Indonesia. (2008). *Heart of Borneo Indonesia. Heart of Borneo Initiative*, 4.

baik, maka hal tersebut dapat menguntungkan banyak pihak, baik dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya. Keuntungan yang di dapat juga diharapkan tidak hanya bagi Indonesia saja, namun juga adanya manfaat dan dampak positif yang merata bagi semua pihak. Hal tersebut tentunya terkait dengan visi WWF, yakni pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa mendatang.<sup>4</sup> Dimana setiap program yang dilakukan oleh WWF harus berguna bagi semua pihak, seperti yang akan dibahas pada skripsi ini, yakni *Transboundary Ecotourism*. *Ecotourism* atau ekowisata sendiri merupakan sebuah kunjungan ke suatu tempat yang relatif belum terganggu oleh manusia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan yang bertanggungjawab. Dimana memiliki maksud bahwa para pengunjung tidak merusak *biodiversity* yang ada di kawasan atau sekitar kawasan konservasi, seperti taman nasional.

Salah satu *project* yang dijalankan oleh WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat di kawasan HoB adalah *Transboundary Ecotourism* antara Indonesia (Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dengan Malaysia (Batang Ai *National Park* (BANP). Mengingat wilayah tersebut saling berbatasan dan dianggap sangat berpotensi untuk dijalanannya hubungan kerjasama bilateral dalam isu lingkungan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam bekerjasama dengan WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat untuk membantu dalam hal konservasi lingkungan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. WWF sebagai CSO pun tidak menanganinya sendiri, namun juga terdapat beberapa komunitas atau kelompok yang turut bekerjasama dengan WWF-Indonesia, khususnya Program Kalimantan Barat dalam *Transboundary*

---

<sup>4</sup> Data dikutip dari [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id) tentang “Visi WWF-Indonesia”. Diakses pada 18 Juli 2013

*Ecotourism* di Kapuas Hulu. WWF-Indonesia juga bekerjasama dengan CSO lainnya untuk mendapat dukungan pendanaan dari jaringan WWF di dunia. Selain itu, keikutsertaan masyarakat lokal juga semakin memperkuat dijalankannya program ini.

WWF-Indonesia tidak bekerja sendiri dalam *project* ini. Dalam level lokal, seperti yang tertulis dalam dokumen laporan pengembangan ekowisata di Kapuas Hulu milik Hermas Rintik Maring sebagai *Ecotourism Development Officer* WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat, bahwa bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan WWF-Indonesia, telah dilakukan pelatihan "Pemandu Tingkat Madya di HoB." Pelatihan tersebut diikuti oleh lebih dari 38 orang pemandu lokal dan pejabat pariwisata terkait dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Para Pejabat yang ikut serta antara lain dari Dinas Pariwisata Kapuas Hulu dan Sintang dari Kalimantan Barat, Dinas Pariwisata Nunukan dari Kalimantan Timur, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>5</sup> Sedangkan pada kerjasama tingkat internasional, yakni *International Timber Trade Organization* (ITTO) bersama Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dan WWF-Indonesia telah mengadakan pelatihan bagi masyarakat Adat Krayan yang telah dikenal dengan kerajinan yang menggunakan bahan-bahan lokal.<sup>6</sup> Dalam konteks pengembangan proyek lintas batas ini, WWF-Indonesia bekerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dengan dukungan pendanaan

---

<sup>5</sup>Wawancara penulis dengan Hermas Rintik Maring sebagai *Ecotourism Development Officer* WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat

<sup>6</sup>Ibid

dari proyek ITTO fase III dengan skema *Government to Government*.<sup>7</sup>

Kerjasama yang telah dijalin antara WWF-Indonesia dengan banyak pihak tentu tidak terlepas dari visi dasar WWF. Visi dasar WWF-Indonesia itu sendiri yaitu pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa mendatang<sup>8</sup>. Adapun alasan lainnya, karena WWF-Indonesia ingin mewujudkan dunia dimana manusia dapat hidup selaras dengan alam, yakni dengan program-program konservasi lingkungan dan pengembangan berkelanjutan,<sup>9</sup> maka *Transboundary Ecotourism* ini dirasa sangat baik jika diterapkan di kawasan HoB yang memang merupakan kawasan yang sangat berpotensi, baik secara letak geografisnya yang sangat strategis, kekayaan *biodiversity*, keindahan budaya, dan sumber daya alam yang sangat penting untuk dijaga.

Dukungan telah datang dari berbagai pihak. Hal tersebut merupakan sambutan yang positif terkait pengembangan *Transboundary Ecotourism* di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang merupakan salah satu inisiatif dari dunia kepariwisataan di Indonesia. Munculnya dukungan dari berbagai pihak, kemudian menjadi kekuatan untuk diteruskannya program ini sebagai salah satu upaya konservasi lingkungan yang berbasis wisata.

Kegiatan wisata merupakan kegiatan yang bersifat *international right*. Hal tersebut memiliki maksud, bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk melakukan kegiatan wisata atau *travelling*. Kegiatan wisata ini juga dilindungi,

---

<sup>7</sup>Wawancara penulis dengan Albertus Tjiu sebagai *Project Leader* WWF-Indonesia, Putussibau, Kalimantan Barat pada tanggal 29 Agustus 2013

<sup>8</sup> Dikutip dari [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id) tentang "Tentang Kami". Diakses pada 31 Juli 2013

<sup>9</sup>Dikutip dari [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id) tentang "Visi dan Misi WWF-Indonesia". Diakses pada 19 Juli 2013

baik secara kelembagaan maupun aturan. Saat ini sangat banyak orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dari satu tempat ke tempat lain. Destinasinya pun bermacam-macam, seperti pantai, laut, atau taman nasional. Melihat peluang yang demikian besar pada dunia pariwisata, maka muncullah ekowisata (*ecotourism*) sebagai salah satu alternatif dalam dunia kepariwisataan. Mengingat akhir-akhir ini banyak para wisatawan yang menyatakan bahwa mereka menginginkan destinasi wisata yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sebagian dari mereka yang mencintai wisata atau *travelling*, menyatakan bahwa mereka mengharapkan ada destinasi wisata yang berbasis alam (*back to nature*). Isu yang beredar tentang ekowisata ini membuat para wisatawan penasaran dengan hal ini yang terjadi hanyalah isu saja, sedangkan keberadaan ekowisata itu sendiri belum dapat dirasakan keberadaannya. Hal tersebut memperkuat program ekowisata yang memang merupakan kegiatan wisata berbasis masyarakat dan turut melestarikan alam. Munculnya ekowisata di dunia kepariwisataan, khususnya di Indonesia merupakan kabar baik bagi para pecinta wisata atau *traveller*.

Kehadiran ekowisata di dunia pariwisata memang menjadi kabar baik bagi para pecinta wisata. Terdapat beberapa proses dan progres perkembangan program ekowisata, khususnya di Kapuas Hulu. Seperti yang tercantum dalam laporan kemajuan perkembangan program ekowisata, khususnya di Kapuas Hulu yang ditulis oleh Hermas Rintik Maring, bahwa Pertama, Isu Ekowisata mulai intensif dibahas setelah tim dari Kapuas Hulu (WWF, Dinas Pariwisata, Kab. Kapuas Hulu, dan perwakilan *guide* Kapuas Hulu) kembali dari kegiatan *workshop* di Ujung Kulon pada bulan Juni 2004. Kedua, WWF dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kapuas Hulu melakukan komunikasi dan koordinasi. Ketiga, paska *illegal logging* tahun 2005, WWF secara institusi mulai melakukan diskusi dengan



masyarakat di sekitar TNBK tentang potensi pariwisata dan peluang pengembangannya.<sup>10</sup> Selain hal diatas tersebut, WWF-Indonesia, khususnya Program Kalimantan Barat merupakan salah satu pihak yang ingin mengembangkan wisata berbasis masyarakat dan diharapkan akan mendorong dilakukannya konservasi lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh WWF, bahwa adanya ekowisata ini akan ada kegiatan wisata yang tetap melestarikan lingkungan sekitar. Bahkan pada tahun 2002 pernah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai tahun Ekowisata Indonesia. Terlibat pula departemen-departemen yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan, Departemen Perikanan, dan Departemen Dalam Negeri. Namun sejauh itu segala dukungan dari pihak formal atau dalam kasus ini adalah pemerintah dan jajarannya, belum dapat membuat ekowisata menjadi ‘hidup’ dan dirasakan keberadaannya.<sup>11</sup>

Definisi Ekowisata sendiri menurut *World Conservation Union (WCU)* adalah perjalanan dan kunjungan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan pada wilayah-wilayah yang relatif belum terganggu. Tujuannya adalah untuk menikmati dan menghargai alam yang mengutamakan konservasi, memiliki dampak dari kehadiran pengunjung rendah, dan melibatkan komunitas lokal secara aktif dalam bidang sosial ekonomi yang menguntungkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Maring, H. R. 2012. *Proses dan Progres Pengembangan Ekowisata di Kapuas Hulu 2012*. Kalimantan Barat.

<sup>11</sup> Data dikutip dari [www.google.com](http://www.google.com) tentang “Ekowisata di Indonesia tahun 2002”. Diakses pada 27 Juni 2013

<sup>12</sup>Wawancara penulis dengan Hermas Rintik Maring sebagai *Ecotourism Development Officer* WWF-Indonesia, program Kalimantan Barat pada tanggal 3 Maret 2013

Alasan dipilihnya kawasan di Kalimantan Barat sebagai lokasi dilaksanakannya Program *Transboundary Ecotourism*, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kawasan HoB ini merupakan kawasan hasil kerjasama lintas batas yang dijalin antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, namun selain hal tersebut, di kawasan ini terdapat sesuatu yang sangat istimewa, dimana lebih dari setengah kawasan ini merupakan kawasan lindung. Kawasan ini dinilai memiliki beberapa potensi destinasi wisata unggulan, seperti budaya (*culture*), petualangan, (*adventure*), hingga wisata alam (*nature*). Keunggulan-keunggulan tersebut dirasa mampu menjadi objek yang dapat membantu menyempurnakan program konservasi dan pengembangan berkelanjutan ini.

Seperti yang telah dicantumkan dalam data yang ditulis oleh Anas Nasrullah sebagai *Community Empowerment Coordinator* WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, bahwa Pariwisata adalah industri global dan kontribusi terhadap suatu negarayang sangat besar. Gejala ini hampir ditemukan ditemukan di setiap negara, dengan demikian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan juga terjadi di seluruh dunia (*global impact*). Dampak-dampak ini berupa dampak positif maupun negatif. Maka muncullah terminologi pariwisata berkelanjutan, tidak lain untuk menekan dampak negatif, memperkecil hal-hal yang membahayakan dan mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial yang menyertainya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Data dikutip dari *Draft 3 Ecotourism* tentang “Certification for Community Based Tourism (CBT) for Sustainable Tourism and Ecotourism

WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat merupakan CSO yang menjalankan program Ekowisata Lintas Batas (*Transboundary Ecotourism*) di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu. Spesifik *project* dalam *Transboundary Ecotourism* adalah kerjasama ekowisata lintas batas di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di Indonesia dan Batang Ai *National Park*, (BANP) di Malaysia. Kawasan antara TNBK dan BANP ini memang sangat strategis untuk dijalankannya kerjasama lintas batas dalam hal pariwisata. Hal ini merupakan tantangan pula dalam suatu hubungan internasional yang telah mengalami pergeseran pengategorian antara *high politics* dan *low politics*, karena pada program ini baik WWF, Indonesia, Malaysia, atau pihak manapun yang terlibat harus turut serta bersinergi dengan baik demi menghasilkan hasil yang maksimal.

Selama program ini berjalan, keterlibatan yang ada di dalamnya tidak hanya sebatas Indonesia dengan WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat dengan Malaysia saja. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat diatas, bahwa dalam pelaksanaan pengembangan *Transboundary Ecotourism* ini terdapat pula pihak-pihak lain yang turut serta dalam menyukseskan program ini. Pihak-pihak tersebut, seperti Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (KOMPAKH), *International Tropical Timber Organization* (ITTO), *One World Tour and Travel*, dan lain sebagainya yang berperan sangat penting dalam proyek ini. Keterlibatan para *stakeholders* dan kelompok-kelompok masyarakat lokal atau adat juga memiliki peran sangat penting untuk memastikan kegiatan ekowisata di Kapuas Hulu dapat berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## **Rumusan Masalah**

Bagaimana peran WWF-Indonesia dalam inisiatif dan rencana aksi pengembangan *Transboundary Ecotourism* lintas batas antara Indonesia-Malaysia?

## **Kerangka Teori**

Berbicara tentang kerjasama hubungan internasional, maka secara tidak langsung akan membahas pula tentang aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Seperti pada data-data diatas yang telah disebutkan, terkait WWF-Indonesia sebagai *Civil Society Organization* (CSO) memiliki peran yang cenderung besar dalam pemerintahan suatu negara. Contohnya saja yang ada di Indonesia, bagaimana Indonesia melakukan kerjasama dengan CSO sebagai upaya untuk pencapaian sebuah target. Dalam kasus ini target yang dimaksud adalah konservasi lingkungan, karena memang isu lingkungan kini telah menjadi sebuah *high politics issue*, sehingga dirasa sangat perlu melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya, termasuk CSO yang memang merupakan lembaga di luar pemerintahan.

Fenomena ini diketahui dengan sejarah yang menunjukkan bahwa adanya sedikit kegagalan peran dari Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan program ekowisata tersebut. Meskipun sudah didukung cukup kuat oleh pihak-pihak formal dari pemerintahan, departemen-departemen, dan kementerian terkait dengan isu lingkungan ternyata tidak cukup membantu menyelesaikan program ini. Sehingga pada kasus ini, WWF-Indonesia sebagai CSO ingin menunjukkan, bahwa keterlibatan perannya dalam pemerintahan dapat membantu dan meningkatkan kualitas program terkait.

Teori dan konsep dalam skripsi ini dirasa perlu untuk memberi pandangan-pandangan dan mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi diatas (secara akademik) untuk kemudian membentuk hipotesis atas peran WWF-Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan satu teori dan satu konsep dalam skripsi ini. Teori tersebut adalah *Global Civil Society* dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*)

### **1. Global Civil Society (Jan Aart Scholte, 2000)**

Teori yang dinyatakan oleh Scholte juga membuktikan bahwa keterlibatan organisasi-organisasi non-pemerintah bukanlah hal yang asing. Keterlibatan organisasi non-pemerintah ternyata telah menciptakan banyak perubahan nyata dalam perkembangan suatu negara.

Menurut Scholte dalam artikelnya yang berjudul “*Civil Society and Democratically Acutable Global Governance*” mencoba membahas beberapa hal sehubungan dengan masyarakat sipil dan akuntabilitas tata kelola global. Scholte dalam hal ini berusaha mengkaji keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola global dengan menguraikan beberapa cara umum bagaimana asosiasi masyarakat sipil mempromosikan peningkatan akuntabilitas dalam tata kelola global. Selain itu, Scholte juga mencoba mengidentifikasi beberapa hal yang dinilai mampu mempengaruhi tingkat pencapaian masyarakat sipil dalam tata kelola global.<sup>14</sup>

Pada banyak kesempatan, asosiasi masyarakat sipil telah membuat otoritas global menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan secara publik dalam hal program serta pendekatan kebijakan secara keseluruhan.<sup>15</sup> Scholte juga menyatakan, bahwa *global civil society* meliputi beberapa aktivitas sipil, dimana:

---

<sup>14</sup> Data dikutip dari <http://dinar-p-p-fisip09.web.unair.ac.id>. Diakses pada 31 Agustus 2013

<sup>15</sup> Ibid

Pertama, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil tersebut merupakan aktivitas dalam lingkup global.

Kedua, membahas isu-isu yang bukan hanya isu domestik, namun juga isu antarnegara, seperti *global warming*, *nuclear weapon*, *Aids*, *disaster relief*, dan *famine*.

Ketiga, membangun atau menciptakan komunikasi yang lebih luas, yakni komunikasi lintas batas (*trans-border communication*)

Keempat, mendorong adanya solidaritas yang lebih baik, seperti solidaritas *supra-national*.

Kelima, membawa masyarakat untuk melakukan kegiatan yang melintasi *nation-state*.<sup>16</sup>

Penjelasan lainnya, seperti yang tertulis dalam buku *Globalization a Critical Introduction* oleh Scholte, bahwa “*Other globalizations pursue mainly commercial activities. They include tens of thousands of global companies, often imprecisely named ‘multinational corporation’*”.<sup>17</sup> Menurut Scholte, “*Finally, many civic associations today have a global organizations. On the one hand, so-called ‘global civil society’ includes thousands of transborder agencies. These business lobbies, trade union confederations, religious bodies, NGOs and other nonofficial, non commercial organizations have a transworld membership and maintain operations across many countries simultaneously*.”<sup>18</sup> Sebagai tambahan oleh Scholte, bahwa saat ini sudah banyak organisasi masyarakat lokal yang dengan cara mengglobal antara satu dengan yang lainnya melakukan kegiatan

---

<sup>16</sup> Seperti yang dikutip dari Ade Marup Wirasenjaya dalam *handout* mata kuliah Pengantar Studi Globalisasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

<sup>17</sup>Scholte, J. A. 2000. *Globalization a Critical Introduction*. Great Britain: palgrave macmillan.

<sup>18</sup> Ibid

lintas batas, seperti *transborder network* dan koalisi yang juga melintasi batas.

Seperti halnya dengan WWF-Indonesia, dimana WWF-Indonesia merupakan sebuah CSO yang memiliki lingkup kerja tidak hanya domestik, namun juga sudah melintasi batas antar satu negara dengan negara lain. WWF-Indonesia juga memiliki *global membership*.

## **2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

WWF-Indonesia sebagai *Civil Society Organization* dengan keterlibatannya dalam suatu pemerintahan, baik secara lokal maupun global, ingin menerapkan prinsip-prinsip konservasinya dengan dasar *Sustainable Development*. Dimana terdapat beberapa pemahaman terkait konsep *Sustainable Development* ini. Menurut Heal, 1998 dalam Fauzi, 2004 bahwa konsep pembangunan berkelanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena berkelanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa mendatang dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungannya.

Pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Heal sejalan dengan peran WWF-Indonesia yang mengembangkan prinsip konservasinya dengan dilaksanakannya pengembangan *Transboundary Ecotourism*. Dimana WWF-Indonesia ingin menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam dan bagaimana dengan kegiatan wisata yang dilakukan, maka tidak pula merusak lingkungan yang ada.

Terdapat beberapa penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang dinyatakan oleh Natori (2001). Natori menekankan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dari pembangunan berkelanjutan ini, yaitu:

1. Terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
3. Terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya
4. Kesejahteraan masyarakat lokal serta kepuasan wisatawan<sup>19</sup>

Pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Natori, didukung dengan pernyataan dari WTO (1999:42) yang menyatakan bahwa terdapat tiga hal penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu:

1. *Quality*

*Sustainable tourism provides a quality experience for visitors, while improving the quality of the host community and protecting the quality of environment*

2. *Continuity*

*Sustainable tourism ensures the continuity of the natural resources upon which it based and the continuity of the cultural of the host community with satisfying experience for visitors*

3. *Balance*

*Sustainable tourism balances the need of the tourism industry, supporters of environment, and the local community<sup>20</sup>*

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan adanya kualitas, keberlanjutan dan keseimbangan. Dimana pada proses pengembangannya harus ada pengalaman yang berkualitas bagi para wisatawan sembari meningkatkan kualitas komunitas lokal dan menjaga kualitas lingkungan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selain itu harus

---

<sup>19</sup> Dikutip dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu) tentang *Sustainable Development dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat*. Diakses pada 20 Desember 2013

<sup>20</sup> Ibid



berkelanjutan. Dimana dalam pengembangan daerah tersebut, sumber daya alam merupakan hal paling penting dan keberlanjutan dari budaya lokal yang mampu memenuhi keinginan wisatawan yang datang. Hal ketiga yakni keseimbangan proses keberlanjutan wisata merupakan kebutuhan dari industri wisata yang tentunya didukung oleh lingkungan dan komunitas lokal pada kawasan wisata.

Pada tujuan-tujuan seperti itulah peran WWF-Indonesia sebagai *Civil Society Organization* dibutuhkan. Menurut Emil Salim (2006), dalam mengimplementasikan konsep pembangunan harus menekankan pentingnya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan memperhatikan hukum ekonomi, alam-ekologi dan peradaban. Jika ketiga aktor tersebut dapat bersinergi dan konsisten, maka pembangunan berkelanjutan akan dapat dengan baik dikembangkan.<sup>21</sup>

Teori dan Konsep tersebut sejalan dengan peran WWF-Indonesia dalam pengembangan *Transboundary Ecotourism* antara Indonesia dan Malaysia. Bagaimana keterlibatan WWF-Indonesia sebagai *Civil Society Organization* memiliki kontribusi penting dalam konservasi lingkungan yang bertujuan untuk melakukan *sustainable development* di kawasan konservasi Taman Nasional Betung Kerihun dan Batang Ai *National Park*.

## **Hipotesis**

Penjelasan di atas terkait kerjasama WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat dengan Malaysia, bahwa peran WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat dalam *Transboundary Ecotourism* Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) –

---

<sup>21</sup> Dikutip dari <http://anshor83.wordpress.com> tentang “Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan, Implementasi dan Tantangannya di Indonesia”. Diakses pada 20 Desember 2013

Batang Ai *National Park* (BANP) di Kalimantan Barat adalah:

Pertama, WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat berperan sebagai inisiator dan implementor dalam *Transboundary Ecotourism Project* antara Indonesia (Taman Nasional Betung Kerihun) dan Malaysia (Batang Ai *National Park*) di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kedua, WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat berlaku sebagai *bridge* atau jembatan komunikasi dengan semua pihak yang terkait, seperti pemerintah nasional maupun lokal, masyarakat lokal, organisasi lokal maupun internasional lain yang turut terlibat di dalam pengembangan *Transboundary Ecotourism* antara Indonesia (Taman Nasional Betung Kerihun) dengan Malaysia (Batang Ai *National Park*) di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

Pertama, penulis menggunakan pengumpulan data dengan *library research* atau pengumpulan data kepustakaan yang berasal dari jurnal, buku, artikel, dan media lainnya seperti internet yang masih terkait dengan isu yang dibahas. Hal ini membantu penulis untuk menjelaskan secara teoritis permasalahan yang muncul dalam penelitian.

Kedua, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif, dimana analisis yang dilakukan hanya sebatas deskripsi, seperti menjelaskan apa saja peran WWF dalam *Transboundary Ecotourism* antara Indonesia dan Malaysia.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, memberikan informasi dan penjelasan tentang peran WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat, khususnya Ekowisata Lintas Batas atau dalam hal ini adalah *Transboundary Ecotourism* antara Indonesia dengan Malaysia (*Transboundary Ecotourism*) di Kapuas Hulu.

Kedua, diharapkan adanya pengetahuan baru terkait isu-isu hubungan internasional, khususnya dalam hal lingkungan. Selain itu memperkenalkan ekowisata kepada para pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait mendatang yang akan dilakukan.

Ketiga, memberikan gambaran akan kondisi yang nyata tentang keterkaitan antara teori dan realita dalam hubungan internasional yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

Keempat, penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi pembahasan dalam skripsi ini, maka dirasa perlu untuk membuat batasan pembahasan atau batasan penelitian. Seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam *Transboundary Ecotourism* ini tentu saja memiliki tugas dan perannya masing-masing, maka sesuai dengan alur dari judul yang dibuat di skripsi ini, penulis akan membatasi pembahasan hanya dalam lingkup peran WWF sendiri, karena isu yang terkait adalah isu lingkungan yang telah menjadi *high*

*politics issue* dan keterlibatan lembaga-lembaga non-formal, seperti CSO dalam pemerintahan suatu negara atau dalam hal ini adalah Indonesia.

Penulis akan menjelaskan lebih jelas dan detail terkait peran dari WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat dalam spesifikasi proyek *Transboundary Ecotourism* di Taman Nasional Betung Kerihun TNBK) dan Batang Ai *National Park* (BANP) antara Indonesia dengan Malaysia, mengingat posisi WWF sebagai CSO yang bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi lainnya. Rentang waktu yang diambil adalah dari tahun 2005-2013. Dimana pada tahun 2005 WWF-Indonesia, Kalimantan Barat pertama kali menginisiasi dan memulai praktik bekerjanya ekowisata. Sedangkan batasan wilayah dalam studi ini adalah Indonesia (Kapuas Hulu) – Malaysia (Sarawak).

### **Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bagian pembahasan dan akan lebih diperjelas lagi dengan sub-sub yang saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya, sehingga penulisan skripsi ini menjadi sistematis.

#### **BAB I :**

Bab ini merupakan pendahuluan, dimana berisi alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah yang muncul dari latar belakang yang telah dijelaskan, kerangka pemikiran yang berisi teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II:**

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan secara umum tentang WWF, seperti sejarah keterlibatan WWF dalam isu-isu lingkungan, tujuan dan program-program konservasi WWF terutama di Indonesia, serta kiprah WWF-Indonesia

dalam menangani isu lingkungan di Indonesia.

### BAB III:

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan masalah-masalah (*problem*) lingkungan di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia, sehingga hal tersebut menjadi alasan WWF untuk datang dan bekerja di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.

### BAB IV:

Dalam bab ini akan membahas lebih dalam dan fokus terhadap peran WWF-Indonesia, Program Kalimantan Barat dalam inisiatif dan rencana aksi pengembangan ekowisata perbatasan (lintas batas) antara Indonesia dan Malaysia di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas terkait inisiatif WWF-Indonesia itu sendiri dalam *Transboundary Ecotourism* sebagai salah satu *Civil Society Organization (CSO)*.

### BAB V:

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada seluruh bab sebelumnya.